

Dalam perspektif administrasi kewilayahan, Kabupaten Blora berbatasan dengan sejumlah kabupaten di sekitarnya. Di sebelah barat, Blora berbatasan dengan Kabupaten Grobogan; di sebelah utara, dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang; di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur; sedangkan di sebelah selatan, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, yang juga berada dalam yurisdiksi Provinsi Jawa Timur.

Konfigurasi batas wilayah tersebut tidak hanya membentuk karakteristik geografis Kabupaten Blora, tetapi juga mempengaruhi orientasi pembangunan wilayah, khususnya dalam perencanaan infrastruktur, tata ruang, dan pengembangan konektivitas regional yang berkelanjutan. Dengan demikian, posisi Kabupaten Blora menjadi penting dalam kerangka pembangunan lintas batas provinsi yang saling terintegrasi.

1.9.2 Topografi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora secara astronomis terletak pada koordinat antara 111°016' hingga 111°338' Bujur Timur dan 6°528' hingga 7°248' Lintang Selatan. Wilayah ini berada di bagian utara Pulau Jawa dan sepenuhnya merupakan daratan tanpa akses langsung ke wilayah pesisir. Secara fisiografis, morfologi Blora didominasi oleh bentang alam perbukitan karst yang merupakan bagian dari struktur geologis Pegunungan Kendeng—baik di sisi utara maupun selatan—yang memanjang secara longitudinal dari barat ke timur. Struktur geomorfologi ini membentuk lanskap khas yang memengaruhi tidak hanya tatanan ekologis, tetapi juga aspek-aspek pemukiman dan distribusi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Keberadaan formasi karst tersebut memiliki dampak langsung terhadap karakter sumber daya alam yang tersedia, terutama dalam hal ketersediaan lahan pertanian, kehutanan, serta sistem tata air permukaan. Dalam konteks hidrologi, Kabupaten Blora dilintasi oleh dua sungai besar yang memiliki fungsi strategis, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi. Kedua aliran air ini tidak hanya berperan sebagai sumber utama irigasi dan kebutuhan air domestik, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti perikanan air tawar dan pertanian lahan basah. Sungai-sungai tersebut menjadi elemen penting dalam sistem ekologis regional dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang bergantung pada sektor agraris.

1.9.3 Kondisi Demografi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan dengan total populasi yang mencapai 901.621 jiwa pada tahun 2023, mengalami peningkatan dari 888.224 jiwa pada tahun sebelumnya (2022). Dengan luas wilayah yang mencakup 1.955,82 km², kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Blora adalah 506,14 jiwa per km². Data ini menggambarkan sebaran penduduk yang bervariasi di seluruh wilayah, dengan kecamatan-kecamatan tertentu memiliki jumlah penduduk yang signifikan.

Tabel 0.1 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Blora Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Blora (Ibu Kota)	94.762
2	Cepu	77.702
3	Jepon	64.049
4	Banjarejo	63.813
5	Ngawen	62.015
6	Jiken	38.701
7	Sambong	28.527
8	Bogorejo	25.202
9	Randublatung	78.813

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
10	Kedungtuban	58.465
11	Tunjungan	48.975
12	Japah	35.937
13	Kunduran	67.519
14	Todanan	64.943
15	Kradenan	41.800
16	Jati	50.398

Sumber : <https://blorakab.bps.go.id>

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2.1.3, jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2023 menunjukkan distribusi yang bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Blora yang merupakan ibu kota kabupaten mencatat jumlah penduduk tertinggi dengan total 94.762 jiwa. Hal ini mencerminkan karakteristik umum wilayah pusat pemerintahan yang cenderung memiliki konsentrasi penduduk lebih tinggi akibat keberadaan fasilitas administrasi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan wilayah lainnya. Kecamatan Randublatung dan Cepu menempati posisi kedua dan ketiga dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 78.813 dan 77.702 jiwa. Keduanya merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis, khususnya Cepu yang dikenal sebagai wilayah penghasil minyak dan gas bumi.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Bogorejo, yang hanya memiliki 25.202 jiwa. Diikuti oleh Sambong dengan 28.527 jiwa dan Japah dengan 35.937 jiwa. Jumlah penduduk yang relatif rendah di kecamatan-kecamatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi geografis, tingkat aksesibilitas, serta terbatasnya peluang ekonomi dan fasilitas umum. Secara umum, persebaran jumlah penduduk di Kabupaten Blora tampak tidak merata. Faktor-faktor seperti urbanisasi, potensi ekonomi wilayah, ketersediaan infrastruktur, serta kondisi geografis berperan besar dalam memengaruhi pola sebaran ini. Data ini

penting sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam hal pemerataan pelayanan publik, perencanaan wilayah, dan strategi pembangunan ekonomi lokal

1.9.4 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Blora

Tingkat pendidikan masyarakat menjadi indikator kunci dalam mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Blora. Peran pendidikan sangat vital, tidak hanya dalam mendukung kemajuan sosial dan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut disajikan tabel mengenai distribusi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Blora tahun 2024, yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang diselesaikan:

Tabel 0.2 Jenjang Pendidikan Masyarakat Blora Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	27,97%	258.748
Tidak Tamat SD	4,55%	42.905
Tamat SD	37,26%	344.936
Tamat SMP	13,21%	122.314
Tamat SMA	13,43%	124.314
Diploma I & II	0,11%	1.018
Diploma III	0,82%	7.590
Sarjana (S1)	2,53%	23.412
Magister (S2)	0,12%	1.111
Doktor (S3)	0,002%	19

Sumber : <https://blorakab.bps.go.id>

Data dari Tabel 2.1.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Blora pada tahun 2024 masih didominasi oleh kelompok dengan latar belakang pendidikan dasar dan di bawahnya. Sebanyak 27,97% penduduk atau sekitar 258.748 jiwa tercatat tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan formal. Angka ini cukup signifikan dan menunjukkan masih adanya

tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil.

Kelompok terbesar berikutnya adalah penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), yaitu 37,26% atau 344.936 jiwa. Jika digabungkan dengan mereka yang tidak tamat SD (4,55% atau 42.905 jiwa), maka lebih dari 69% penduduk Blora hanya memiliki pendidikan setingkat SD atau bahkan kurang dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Blora masih berada dalam kategori pendidikan rendah, yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam hal daya saing dan kapasitas kerja. Penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) mencapai 13,21% (122.314 jiwa), sementara yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sedikit lebih tinggi yaitu 13,43% (124.314 jiwa). Meski demikian, jumlah ini masih belum mencerminkan proporsi ideal dalam mendukung transformasi ekonomi ke arah sektor formal dan industri berbasis pengetahuan.

Tingkat pendidikan tinggi di Kabupaten Blora masih sangat rendah. Penduduk yang memiliki ijazah Diploma I & II hanya 0,11% (1.018 jiwa), Diploma III 0,82% (7.590 jiwa), Sarjana (S1) 2,53% (23.412 jiwa), dan Magister (S2) hanya 0,12% (1.111 jiwa). Bahkan, pemilik gelar Doktor (S3) hanya 0,002% dari total populasi atau hanya 19 jiwa. Rendahnya jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan akses dan minat terhadap pendidikan lanjut, baik melalui beasiswa, program pendidikan vokasional, maupun penguatan institusi pendidikan tinggi di daerah.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Blora dalam sektor pendidikan adalah meningkatkan partisipasi dan kelulusan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi tersebut semakin memperjelas pentingnya perhatian terhadap kelompok-kelompok yang rentan, khususnya Anak Tidak Sekolah (ATS). Keberadaan kelompok ini menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai program pendidikan di daerah, termasuk melalui inovasi Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT). Program SILAT bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang belum mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan secara formal. Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah-daerah yang lebih terpencil.

1.10 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

1.10.1 Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Pembentukan lembaga ini dilandasi oleh dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*

Kabupaten Blora, yang tercantum dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, serta Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11. Seiring berjalannya waktu, struktur dan klasifikasi Dinas Pendidikan mengalami penyesuaian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pendidikan.

Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora ditetapkan sebagai Dinas Daerah Tipe A, yang menunjukkan bahwa dinas ini memiliki kompleksitas urusan, beban kerja, serta jangkauan layanan yang luas. Penetapan sebagai dinas tipe A mencerminkan pentingnya fungsi strategis lembaga ini dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan dasar dan menengah.

Secara administratif, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dengan kode pos 58219. Lokasi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berlokasi di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Blora, yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan daerah. Lokasinya cukup strategis memberikan kemudahan akses bagi masyarakat maupun instansi lain yang memiliki hubungan kerja dengan Dinas Pendidikan.

Di sekitar area kantor terdapat berbagai fasilitas dan institusi penting, seperti GOR Mustika Blora, Kantor DPRD Kabupaten Blora, sejumlah sekolah, taman rekreasi Water Splash, serta Lapangan Kridosono. Letaknya juga berada pada jalur utama lintas kota, yang menghubungkan Kabupaten Blora dengan wilayah sekitar seperti Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, dan Kecamatan Cepu, hingga ke Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Hal ini memperkuat posisi Dinas

Pendidikan tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik yang mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Secara keseluruhan, keberadaan dan perkembangan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mencerminkan dinamika reformasi birokrasi di tingkat daerah. Penyesuaian struktur kelembagaan melalui perangkat hukum yang sah menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.10.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora memiliki visi, misi, dan motto layanan sebagai berikut :

a. Rumusan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Visi merupakan pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai suatu organisasi, institusi, atau daerah pada masa depan. Visi bukan hanya sebatas tujuan akhir, melainkan juga menjadi arah strategis yang membimbing seluruh aktivitas dan kebijakan pembangunan. Penyusunan visi didasarkan pada identifikasi kekuatan, tantangan, peluang, dan keterbatasan yang dimiliki oleh suatu daerah, serta mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berkembang.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan daerah sebagai berikut:

“Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”

Visi ini mencerminkan semangat kolektif untuk membangun Kabupaten Blora secara inklusif, progresif, dan berkelanjutan. Visi tersebut bukan hanya

menjadi slogan, melainkan menjadi pijakan filosofis dan arah kerja seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam periode lima tahun pembangunan.

Makna dan Penjabaran Visi:

1. Sesarengan Mbangun Blora

Frasa dalam bahasa Jawa ini berarti “*bersama-sama membangun Blora*”. Makna utama dari bagian ini adalah ajakan partisipatif yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Semangat gotong royong menjadi dasar utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dengan mengoptimalkan segala potensi lokal dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing elemen, pembangunan akan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. Unggul

Istilah "unggul" merujuk pada tekad Kabupaten Blora untuk menjadi daerah yang memiliki kelebihan kompetitif dibandingkan wilayah lain. Keunggulan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kualitas sumber daya manusia, pencapaian indikator pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi lokal, inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Visi ini mendorong agar Blora mampu memanfaatkan potensi internalnya secara optimal untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

3. Berdaya Saing

Komponen terakhir dari visi ini menekankan pentingnya *daya saing daerah*, yaitu kemampuan Blora untuk bersaing dengan daerah lain baik dalam skala regional maupun nasional. Daya saing tersebut mencakup dua dimensi: keunggulan komparatif (misalnya kekayaan sumber daya alam, posisi geografis, dan warisan budaya) dan keunggulan kompetitif (inovasi teknologi, efektivitas birokrasi, kualitas pendidikan, dan iklim investasi). Kabupaten Blora diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, visi “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing” tidak dapat dipandang sekadar sebagai cita-cita normatif semata, melainkan merupakan sebuah arah strategis pembangunan jangka menengah yang mengandung makna mendalam. Visi ini merefleksikan komitmen bersama untuk mendorong kolaborasi antarsektor, penguatan potensi lokal, serta peningkatan kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang kehidupan.

Penerapan visi ini mengisyaratkan bahwa setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, memiliki tanggung jawab untuk menjadikan visi tersebut sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan sektoral. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja yang disusun memiliki keselarasan dengan arah pembangunan yang bersifat integratif, berkelanjutan, dan berorientasi ke masa depan.

Dengan menjadikan visi daerah sebagai acuan, Dinas Pendidikan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga harus mampu berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing secara global, sehingga sejalan dengan misi besar Kabupaten Blora menuju daerah yang mandiri, maju, dan kompetitif di tengah dinamika perubahan regional, nasional, dan global.

b. Rumusan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Sesuai dengan visi “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Dengan menjadikan visi daerah sebagai acuan,

Berdasarkan Visi dan Misi di dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 maka Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berkewajiban mewujudkan Visi dan Misi Bupati terutama Misi pertama yaitu “Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter”. Dengan sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan strategi

pencapaian meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui:

- a. pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan;
- b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah;
- c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah;
- d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan

Motto Layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora :

MIRASA : Melayani dengan RASA (Responsif, Akurat, Santun dan Amanah)

Motto ini mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Blora untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan amanah kepada seluruh masyarakat. Selain itu, juga mengutamakan pendekatan yang penuh rasa, yang menekankan pentingnya sikap santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.

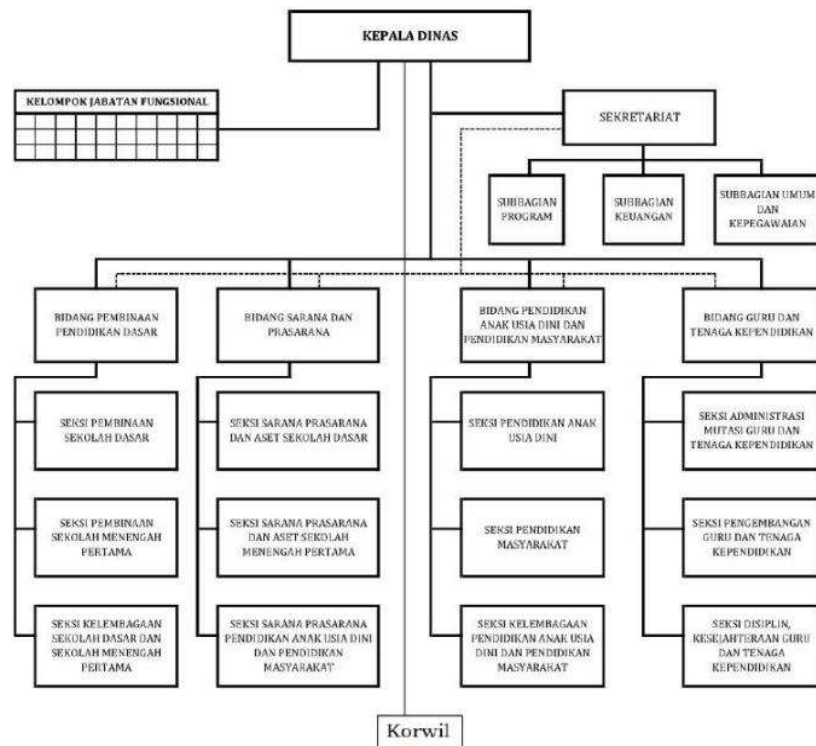
1.10.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Blora

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora disusun secara sistematis guna mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan daerah. Sebagai institusi publik yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah kabupaten. Pembagian unit kerja yang jelas tidak hanya mencerminkan prinsip efektivitas birokrasi, tetapi juga menunjang kelancaran inovasi strategis, seperti pemanfaatan Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT)

merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mempercepat transformasi layanan pendidikan, khususnya dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan layanan administrasi kependidikan.

Secara kelembagaan, struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Blora terdiri dari beberapa unsur utama sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas membawahi Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan, dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang pembinaan pendidikan dasar membawahi seksi pembinaan sekolah dasar, seksi pembinaan sekolah menengah pertama
4. Bidang sarana dan prasarana membawahi seksi sarana prasarana dan aset sekolah dasar dan seksi sarana prasarana dan aset sekolah menengah pertama
5. Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat membawahi seksi pendidikan anak usia dini dan seksi pendidikan masyarakat
6. Bidang guru dan tenaga kependidikan membawahi seksi administrasi mutasi guru dan tenaga kependidikan serta seksi disiplin dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.



Gambar 0.2 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Sumber : <https://dinaspendidikan.blorakab.go.id/>

Penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi inovasi digital melalui aplikasi SILAT (Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu) sebagai instrumen strategis dalam mendukung penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora. Fokus utama diarahkan pada bagaimana sistem ini diintegrasikan dalam struktur kelembagaan Dinas Pendidikan, serta sejauh mana teknologi tersebut mendukung pencapaian sasaran pemerataan pendidikan dasar.

Dalam konteks organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sekretaris Dinas memainkan peran sentral, khususnya melalui koordinasi dan supervisi terhadap Subbagian Program, yang memiliki mandat dalam perencanaan, pengumpulan data, serta pemantauan pelaksanaan program pendidikan. Unit ini berperan penting dalam menyusun kerangka kerja implementatif SILAT, melakukan pemetaan

wilayah dengan angka ATS tinggi, serta memastikan bahwa seluruh intervensi program berbasis pada data yang valid dan aktual.

Melalui sinergi antara fungsi perencanaan dan pemanfaatan teknologi informasi, Sekretariat dinas dan Subbagian Program menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa SILAT tidak hanya menjadi sistem administrasi, tetapi juga alat bantu pengambilan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan daerah. Peran strategis inilah yang menjadi alasan pemilihan fokus pada unit tersebut dalam kerangka penelitian ini.

1.10.4 Inovasi Aplikasi SILAT

1.10.4.1 Gambaran Umum Profil Aplikasi SILAT

Latar belakang lahirnya Sistem Layanan Administrasi Pendidikan Terpadu (SILAT) di Kabupaten Blora tidak terlepas dari urgensi peningkatan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pemerintah daerah menyadari bahwa masalah ATS tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya integrasi data, lemahnya sistem monitoring, serta lambatnya intervensi terhadap kasus anak yang terancam putus sekolah. Selain itu, kompleksitas birokrasi dalam layanan administrasi pendidikan seperti mutasi, pencatatan ATS, dan pendataan siswa rentan, sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menjembatani kebutuhan administrasi dan pelayanan berbasis data secara cepat, akurat, dan terintegrasi.

Tujuan utama dari pengembangan SILAT adalah untuk menciptakan sistem administrasi pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap permasalahan pendidikan, terutama dalam hal pendataan dan penanganan ATS. Dengan sistem ini, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi angka ATS melalui deteksi dini, pelacakan kasus secara sistematis, dan penyediaan layanan pendidikan alternatif yang sesuai dengan kondisi anak. Di sisi lain, SILAT juga dimaksudkan untuk mempercepat layanan administrasi pendidikan rutin seperti proses perpindahan siswa, pemutakhiran data siswa, serta validasi data peserta didik dalam sistem pendidikan dasar dan menengah.

1.10.4.2 Fitur aplikasi SILAT

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan sektor pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Blora. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kurangnya kesadaran orang tua, serta keterbatasan sistem pendataan dan penanganan yang terpadu. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan solusi inovatif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, digitalisasi layanan publik menjadi salah satu strategi yang potensial dalam mendukung tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan responsif. Pemerintah Kabupaten Blora, melalui Dinas Pendidikan, mengembangkan sebuah

sistem berbasis digital bernama Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT). Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam mengidentifikasi, mendata, dan menangani anak-anak yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal maupun non formal.



Gambar 0.3 Tampilan Pilihan Menu Aplikasi SILAT
Sumber : <https://dinaspendidikan.blorakab.go.id/home/>

SILAT memiliki sejumlah fitur utama yang mendukung penanganan ATS secara terintegrasi. Sistem ini menawarkan enam fitur utama yang saling terintegrasi, masing-masing berperan penting dalam mendukung proses pelayanan dan pendataan yang komprehensif. Fitur yang tersedia antara lain:

1. Pelayanan Dinas Pendidikan (Disdik)

Fitur ini menyediakan layanan publik dan administrasi pendidikan seperti pengaduan masyarakat, permohonan informasi, dan berbagai bentuk layanan administratif lainnya, yang bertujuan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan publik terhadap layanan pendidikan.

2. Layanan Sekretariat

Mencakup berbagai keperluan administratif seperti legalisasi ijazah, pengurusan pindah sekolah, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring, serta penyediaan informasi penting terkait data pendidikan dan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blora.

3. Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas)

Menyediakan informasi dan data terkait satuan pendidikan dasar, mulai dari data sekolah dan siswa, hingga informasi seputar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP.

4. Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Mengelola dan menyajikan data terkait satuan PAUD, pendidikan non-formal (Dikmas), serta sekolah-sekolah khusus, sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan.

5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Fitur ini difokuskan pada pengelolaan data guru, termasuk informasi seputar Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan profil guru secara umum, yang menjadi bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.

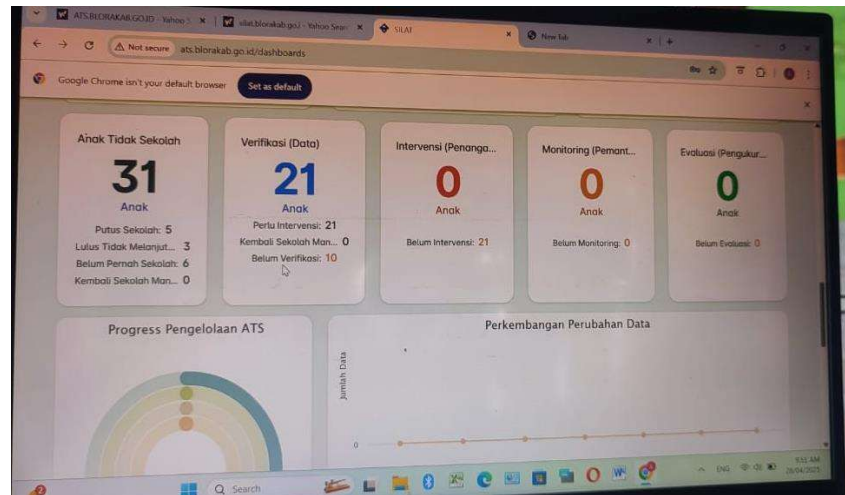
6. Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Menyediakan data dan informasi mengenai infrastruktur pendidikan, termasuk kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat SD dan SMP.

Melalui integrasi fitur-fitur tersebut, SILAT diharapkan mampu mendukung perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang

lebih tepat dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara sistematis dan berkelanjutan. Pada aplikasi SILAT juga dilengkapi dengan modul pelacakan ATS berbasis data kependudukan dan data pendidikan yang mampu mengidentifikasi anak usia sekolah yang tidak terdaftar di satuan pendidikan dalam beberapa wilayah di Blora.

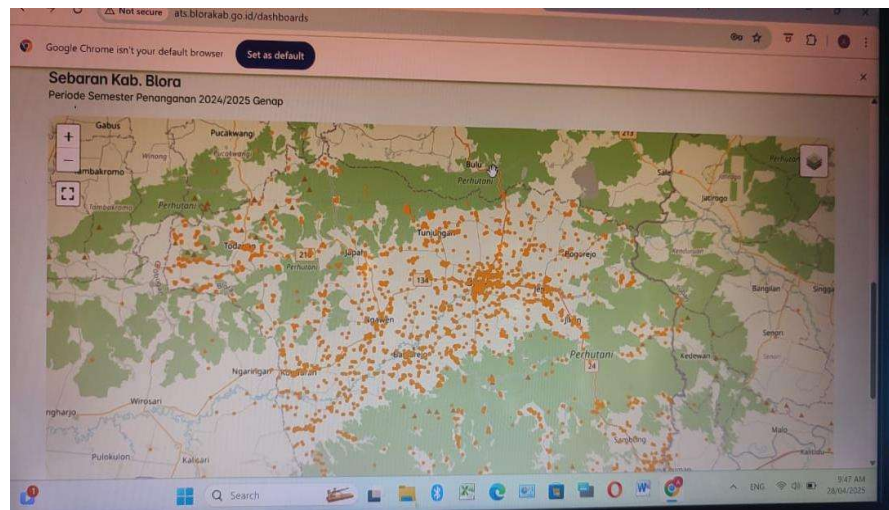
Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur laporan otomatis yang dapat digunakan oleh petugas pendidikan di tingkat desa hingga kabupaten untuk melakukan intervensi kebijakan.



Gambar 0.4 Tampilan Laporan ATS Desa Klopoduwur
Sumber : observasi di Desa Klopoduwur 2025

Aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Anak Terintegrasi) telah dilengkapi dengan fitur unggulan berupa peta sebaran anak tidak sekolah, yang dirancang secara khusus untuk membantu proses identifikasi dan pemetaan anak-anak yang belum mengakses pendidikan formal di wilayah Kabupaten Blora. Fitur ini bekerja dengan menghimpun data dari berbagai kelurahan dan kecamatan, sehingga mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai persebaran anak-anak yang tidak sekolah di tingkat

lokal. Data yang dikumpulkan kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif yang mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi-lokasi spesifik tempat anak-anak tersebut berada. Hal ini memberikan kemudahan bagi dinas terkait dalam memahami sebaran geografis permasalahan pendidikan, sehingga proses pelacakan dan penyusunan strategi intervensi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien.



Gambar 0.5 Tampilan Peta Persebaran Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Blora
Sumber : Observasi di Desa Klopoduwur 2025

Lebih dari sekadar alat pelaporan, fitur peta ini juga berfungsi sebagai sarana pengawasan dan pemantauan yang efektif bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial yang fokus pada isu anak. Dengan adanya tampilan visual yang informatif, stakeholder dapat mengenali pola penyebaran, mengidentifikasi daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, serta merancang program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Di samping itu, keberadaan peta ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan

anak tidak sekolah, karena data yang tersedia dapat menjadi rujukan utama dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti. Secara keseluruhan, fitur ini menjadi komponen penting dalam mendukung upaya pengentasan masalah pendidikan di Kabupaten Blora secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.10.4.3 Cara Penggunaan Aplikasi SILAT

Proses kerja SILAT dimulai dari input data oleh sekolah dan perangkat desa, yang kemudian diverifikasi secara digital dan diolah dalam dashboard pemantauan oleh Dinas Pendidikan. Dari sini, keputusan intervensi seperti program beasiswa, penempatan ke pendidikan nonformal, atau pemulangan ke sekolah reguler dapat segera dilakukan.

Berikut langkah-langkah penggunaan aplikasi SILAT:

1. Input Data dilakukan oleh Sekolah dan Pemerintah Desa

- Sekolah dan perangkat desa mengakses aplikasi SILAT melalui akun masing-masing.
- Data anak yang tidak sekolah dimasukkan ke dalam sistem, mencakup identitas, alamat, dan alasan tidak bersekolah.
- Memastikan data yang diinput lengkap dan akurat.

2. Verifikasi Data Digital

- Setelah data diunggah, sistem SILAT secara otomatis mengirimkan data tersebut untuk diverifikasi oleh petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
- Verifikasi mencakup validasi identitas, kondisi sosial, dan data pendukung lainnya.

- Jika ada kekurangan, operator akan diminta untuk melengkapi kembali.

3. Pemantauan melalui Dashboard Dinas Pendidikan

- Dinas Pendidikan mengakses dashboard SILAT untuk memantau status anak-anak yang tidak sekolah.
- Sistem akan menampilkan data dalam bentuk grafik, peta sebaran, dan indikator lainnya untuk memudahkan analisis.

4. Keputusan Intervensi

Berdasarkan hasil analisis, Dinas Pendidikan menentukan bentuk intervensi yang diperlukan, seperti:

- Pemberian bantuan beasiswa.
- Penempatan di lembaga pendidikan nonformal seperti SKB.
- Pengembalian ke sekolah formal.

5. Koordinasi Lintas Sektor

- SILAT mendukung kerja sama antara sekolah, desa, dan lembaga nonformal.
- Semua pihak memiliki akses ke data sesuai dengan peran dan kewenangan mereka.
- Rapat koordinasi dapat dilakukan untuk merumuskan solusi berbasis data.

6. Pelibatan Masyarakat

- Masyarakat dapat melaporkan anak putus sekolah melalui fitur pelaporan yang tersedia.
- Orang tua dan tokoh masyarakat didorong untuk aktif memantau keberadaan anak putus sekolah atau di lingkungan sekitar mereka.

- Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Dalam pelaksanaannya, SILAT melibatkan berbagai pihak atau stakeholder lintas sektor. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menjadi instansi pengelola utama, namun pelaksanaan di lapangan turut melibatkan operator sekolah, pemerintah desa, serta lembaga nonformal seperti SKB Blora (Sanggar Kegiatan Belajar Blora). Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran data secara cepat dan sinergi dalam penyusunan langkah-langkah intervensi berbasis kondisi riil. Tidak hanya itu, SILAT juga mengajak keterlibatan masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh masyarakat, agar dapat berperan sebagai agen pelapor bagi anak-anak yang putus sekolah di lingkungannya.

1.10.4.4 Manfaat dan Keuntungan SILAT

SILAT (Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk mendukung tata kelola pendidikan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis data. Dari sudut pandang pemerintahan, SILAT mencerminkan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta keterbukaan layanan publik di sektor pendidikan. Program ini tidak hanya merespons kebutuhan akan sistem pendataan anak tidak sekolah yang lebih akurat, tetapi juga memperkuat orientasi hasil dalam pelayanan—mengurangi ketergantungan pada proses administratif yang lambat dan berulang.

Dalam kerangka *e-Government*, SILAT merupakan contoh konkret pemanfaatan teknologi digital untuk mentransformasi layanan publik secara sistematis. Aplikasi ini mengusung prinsip integrasi data, kolaborasi lintas sektor, dan pelayanan yang berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan pendekatan ini, SILAT menjadi alat strategis untuk menjawab tantangan sosial seperti tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), selama diiringi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, komitmen dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. SILAT menunjukkan bahwa teknologi, bila diimplementasikan dengan tepat, dapat menjadi pengungkit perubahan dalam penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan berdampak.